

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD DKI Minta Revitalisasi Monas Distop

JAKARTA (Pos Kota) - DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas. Sebab, sesuai aturan untuk revitalisasi kawasan tersebut terlebih dahulu izin Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI.

Peliput: John

"Saya minta jangan ada pembangunan dulu. Sebab belum ada rekomendasi Kemensetneg," kata Ida Mahmuda, Ketua Komisi D saat rapat dengan Asisten Pembangunan Setdaprov DKI Jakarta beserta jajarannya, Rabu (22/1).

Ida menyebutkan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1995, revitalisasi kawasan cagar budaya seperti di Monas, memerlukan rekomendasi Kemensetneg.

Dari hasil penelusuran komisi, kata Ida, Pemprov belum mendapatkan rekomendasi dari Mensetneg untuk merevitalisasi kawasan Monas.

Menurut Ida, jika dipaksakan maka kha-

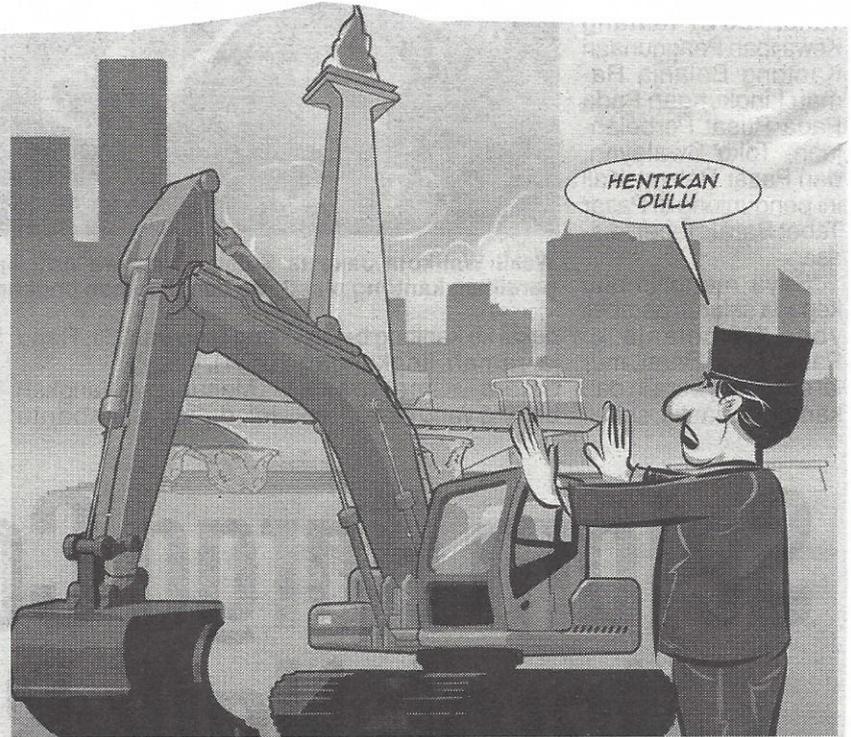
“
**Belum
 Kantongi Izin
 Kemensetneg**
 ”

watir persoalan semakin meluas.

Selain belum mendapatkan rekomendasi Kemensetneg, pemotongan pohon dan pelepasan lelang proyek juga dinilai masih menjadi masalah.

**SESUAI
 PROSEDUR**

Terhadap permintaan Komisi D tersebut, Asisten Pembangunan DKI Jakarta, Yusmada Faisal mengatakan, pelaksanaan revitalisasi



tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Sesuai kontrak maka revitalisasi tuntas bulan depan.

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menyidak proyek revitalisasi sisi selatan Monas yang gundul.

Dalam proyek revitalisasi ini ada 190 pohon harus ditebang.

Saat menyidak, sejumlah anggota DPRD mempertanyakan kejelasan dari proyek ini. Nyatanya, dia mengatakan revitalisasi ini menggunakan anggaran 2019.

"Pekerjaannya ini adalah anggaran 2019, dikerjakan tahun 2020. Masa kerjanya kita cek 50 hari kerja. Makanya saya terkejut juga melihat pekerjaan ini, kok dipaksain seperti ini," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Fraksi PDIP Pandapotan Sinaga. (ruh)